

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari JawatanPost, Telegraph dan Telephone (PTT). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditekankan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Seiring dengan waktu, PT Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota/kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi *elektronik mobile pos* di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah *processing* kiriman pos di mana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

Adapun visi, misi, dan motto yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi Perusahaan Pos Terpercaya

Misi :

1. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik
2. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi
3. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh
4. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat
5. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan

Moto : Terus Bergerak Maju (*Move On*)

Move On dijabarkan dalam :

1. *Vision* : *to be a trusted postal services company*
2. *Action* : *Operational effectiveness, cost efficiency, overwhelming challenge, & increase revenue*

3. *Passion : Champion Postal Company in the Region*
4. *Collaboration : Merger & acquisition*

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya perekonomian negara saat ini, salah satunya dapat dilihat dari semakin banyaknya BUMN yang telah didirikan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian BUMN (2014) ada 138 BUMN yang ada di Indonesia. Kementerian BUMN (2012) menyatakan meningkatnya peran BUMN dalam perekonomian nasional serta dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BUMN, maka BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan BUMN harus menghindari tindak penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis.

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan menjadi satu kesatuan yang relatif besar, maka semakin kompleks pula masalah-masalah perusahaan yang timbul. Salah satu masalah yang timbul yaitu terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengevaluasi operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memerlukan alat yang dapat membantu dalam hal pengendalian untuk pencapaian tujuan perusahaan, seperti adanya audit internal.

Pengendalian intern yang memadai dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen menjaga keamanan harta milik perusahaan dan dapat mencegah serta mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penggelapan yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian intern tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, melainkan bahwa pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan (*fraud*). Jika terjadi hal itu dapat kesalahan atau kecurangan maka hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan tentu saja akan dapat di atasi dengan cepat.

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Mendeteksi kecurangan bukanlah hal yang mudah walaupun dengan suatu usaha pengawasan. Sehingga manajemen perlu bersikap hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan yang dikelolanya, mengingat suatu kecurangan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan kebangkrutan terhadap perusahaan.

Audit internal merupakan audit yang dilaksanakan dengan pemeriksaan yang sistematis atas catatan-catatan, prosedur, dan operasi perusahaan. Sehingga penyimpangan materiil dapat diminimalisir dalam suatu sistem akuntansi. Di samping itu, audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengamankan aktiva perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu perusahaan telah tercapai dan sampai sejauh mana hal tersebut ditaati oleh suatu perusahaan.

Begitu juga pada PT Pos Indonesia (Persero), pengendalian intern dan audit internal merupakan suatu yang sangat penting terutama dalam mendeteksi kecurangan.

Rony Fransisco (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pengendalian Intern dan Audit nternal Terhadap Pendeteksian Fraud” menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya pelaksanaan pengendalian intern dan audit internal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatma (2008) adalah peran audit internal berhubungan negatif dalam pencegahan kecurangan akuntansi. Penelitian Muhamad Alif Haqiqi (2013), hasilnya adalah pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan dalam pencegahan kecurangan.

Menurut beberapa artikel ada banyak kecurangan yang terjadi pada PT Pos Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengamatan,

diketahui PT Pos Indonesia Bandung saat ini mengalami permasalahan dalam hal pemeriksaan intern atau audit internal perusahaan di mana kasus korupsi di PT Pos yang terkait pemberian komisi kepada pelanggan berawal dengan adanya Surat Edaran Direktur Operasional PT Pos No:41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003 yang memberi komisi antara 3%-5% kepada pelanggan. Namun penerapan pemberian komisi dilakukan secara berbeda oleh Kepala Knwil Kantor Pos IV Jakarta yaitu 5%-6%. Selain itu dari hasil pengusutan Kejagung didapati bukti kwitansi tanda terima fiktif dari pelanggan yang seolah-olah uang komisi benar-benar diterima pelanggan. Padahal uang itu diterima sejumlah oknum pegawai PT Pos Indonesia, sehubungan dengan permasalahan tersebut auditor internal dalam hal ini Divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pt Pos Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya memeriksa atau mengaudit laporan keuangan PT Pos Indonesia dan dari hasil pemeriksaan tersebut tim auditor internal atau Divisi SPI PT Pos Indonesia melaporkan dan menyampaikan informasi hasil temuan auditnya kepada pihak manajemen yaitu dewan direksi PT Pos Indonesia yang berisi rekomendasi-rekomendasi maupun saran-saran perbaikannya untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak manajemen dan bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern PT Pos Indonesia agar meningkatkan efektivitas operasional perusahaan untuk lebih baik dan terarah. (Fajar Harya, 2011)

Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengambil alih kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi di PT Pos Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89,9 miliar. Kasus ini sudah lama terjadi namun sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Pemeriksaan internal ditujukan atas dugaan korupsi pembangunan dan pengoperasian Jaringan Wasantara.net oleh PT Altekinto Jejaring Nusantara (PT AJN) senilai Rp 89,9 miliar pada 25 September 1996 silam. Namun, dia tidak merinci hasil sementara pemeriksaan internal atas kasus yang pernah disidik Polda Jawa Barat itu. (www.antikorupsi.org 2007)

Dari fenomena yang terjadi PT Pos Indonesia dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan tidak terlepas dari tindak kecurangan. Untuk mengurangi kecurangan yang ada, manajemen dan auditor internal dituntut untuk dapat meminimalisir kecuranga-kecurangan yang terjadi, yaitu melalui pendeteksian kecurangan tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit internal dalam Mendeteksi Kecurangan(*Fraud*) (Studi Kasus pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (persero) Kota Bandung)”**

1.3 Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian intern, audit internal, dan kecurangan yang terjadi pada PT Pos Indonesia (persero)?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada PT Pos Indonesia (persero) secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada PT Pos Indonesia (persero) secara parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern, audit internal dan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada PT Pos Indonesia (persero).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada PT Pos Indonesia (persero) secara simultan.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada PT Pos Indonesia (persero) secara parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan auditor internal serta menambah wawasan mengenai pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (persero). Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi PT Pos Indonesia (persero)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sehingga dapat semakin menyempurnakan pengendalian intern dan audit internal yang terdapat dalam perusahaan, khususnya untuk mempermudah dalam mendeteksi kecurangan.
- b. Bagi Auditor Internal

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi auditor internal dalam menjalankan aktivitas audit internal agar dapat mendeteksi kecurangan dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), uji validitas dan reabilitas serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, dalam penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai hasil analisis pengaruh pengendalian intern dan audit internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (persero) di Kota Bandung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.